

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN
PENDAPATAN ANTAR PROVINSI
DI INDONESIA**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S1)
Pada Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*



OLEH :

HERLIN PUTRI MORITA

1207339/2012

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG
2018**

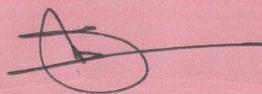
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN
PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA

Nama : Herlin Putri Morita
NIM/TM : 1207339/2012
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2018

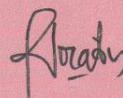
Disetujui Oleh:

Pembimbing I



Prof. Dr. Syamsul Amar, B,MS
NIP. 19571021 198603 1 001

Pembimbing II



Melti Roza Adry, SE, ME
NIP. 19830505 200604 2 001

Diketahui Oleh:
Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Drs. Ali Anis, MS
NIP. 19591129 198602 1001

HALAMAN PENGESAHAN LULUS UJIAN SKRIPSI

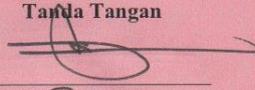
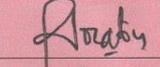
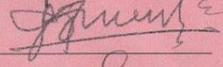
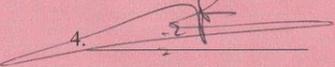
*Dinyatakan Lulus Setelah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETIMPANGAN
PENDAPATAN ANTAR PROVINSI DI INDONESIA**

Nama : Herlin Putri Morita
NIM/TM : 1207339/2012
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi

Padang, Februari 2018

Tim Penguji

No	Jabatan	Nama	Tanda Tangan
1	Ketua	: Prof. Dr. Syamsul Amar, B,MS	1. 
2	Sekretaris	: Melti Roza Adry, SE, ME	2. 
3	Anggota	: Drs. Akhirmen, M.Si	3. 
4	Anggota	: Drs. Zul Azhar, M.Si	4. 

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini,

Nama : Herlin Putri Morita
NIM / Tahun Masuk : 1207339/2012
Tempat / Tanggal Lahir : Bukittinggi, 1 September 1993
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Keahlian : Ekonomi Publik
Fakultas : Ekonomi
Alamat : Jl. Gajah V, No. 3A, Air Tawar Barat, Padang
No. HP / Telepon : 081267577673
Judul Skripsi : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi
Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di
Indonesia

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis/skripsi saya ini, adalah asli dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik (Sarjana), baik di UNP maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis / skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan dari Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis / skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat orang lain yang telah ditulis atau dipublikasikan kecuali secara eksplisit dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan cara menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Karya tulis / skripsi ini **Sah** apabila telah ditandatangani **Asli** oleh Tim Pembimbing, Tim Penguji dan Ketua Jurusan.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima **Sanksi Akademik** berupa pencabutan gelar akademik yang telah diperoleh karena karya tulis / skripsi ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi.

Padang, Februari 2018
Yang menyatakan,



Herlin Putri Morita
NIM. 1207339/2012

ABSTRACT

Herlin Putri Morita (1207339/2012) : *Factors Affecting Income Inequality Among Provinces in Indonesia. Under the guidance of Mr. Prof. Dr. Syamsul Amar, BMS and Mrs. Melty Roza Adry, SE, ME.*

The purpose of this study is to know (1) The effect of labor on income inequality among provinces in Indonesia, (2) The effect of investment on income inequality among provinces in Indonesia, (3) The effect of economic infrastructure on income inequality among provinces in Indonesia, (4) The effect of labor, investment and economic infrastructure altogether on income inequality among provinces in Indonesia.

The type of this study are descriptive and associative. The type of data is secondary data. This study uses panel data that using 32 provinces in Indonesia, by using Fixed Effect Model (FEM) approach.

The result of this study show that : (1) Labor has a negative and significant effect on income inequality among provinces in Indonesia, (2) Investment has no significant effect on income inequality among provinces in Indonesia, (3) Economic infrastructure has no significant effect on income inequality among provinces in Indonesia, (4) Labor, investment and economic structure altogether has significant effect on income inequality among provinces in Indonesia.

Keywords : Income Inequality, Labor, Investment, Economic Structure

ABSTRAK

Herlin Putri Morita (1207339/2012) : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi Di Indonesia. Di bawah bimbingan Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar, B,MS dan Ibu Melti Roza Adry, SE, ME

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui : (1) Pengaruh tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia, (2) Pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia, (3) Pengaruh infrastruktur ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia, (4) Pengaruh tenaga kerja, investasi dan infrastruktur ekonomi secara bersama-sama terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan asosiatif. Penelitian dilakukan di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat, Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Kementerian Keuangan. Penelitian dilakukan pada Bulan Januari 2018. Jenis data dalam penelitian adalah data sekunder. Penelitian ini menggunakan analisis regresi panel yaitu menggunakan 32 provinsi yang ada di Indonesia, dengan menggunakan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)*.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Tenaga kerja berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia, (2) Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia, (3) Infrastruktur ekonomi tidak berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia, (4) Tenaga kerja, investasi, dan infrastruktur ekonomi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia.

Dengan demikian, disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kerja serta keterampilan guru dalam mendidik, karena dengan kualitas pendidikan serta tersedianya sarana dan prasarana pendidikan diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan ketimpangan pendapatan dan lebih memperhatikan tingkat investasi yang terjadi di Indonesia. Serta lebih memperhatikan ketersediaan infrastruktur untuk menunjang perekonomian di Indonesia.

Kata kunci : Ketimpangan Pendapatan, Tenaga Kerja, Investasi, Infrastruktur Ekonomi

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas berkat, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, penyusunan skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia”** dapat diselesaikan dengan baik.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah SWT sehingga kendala-kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Untuk itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Idris, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan fasilitas-fasilitas dan izin dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Drs. Ali Anis, M.S selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dan Ibu Melti Roza Adry, SE, M.E selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar, B,MS selaku pembimbing I dan Ibu Melti Roza Adry, SE, M.E selaku pembimbing II yang telah sabar, tekun, tulus dan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran memberikan bimbingan,

motivasi, arahan dan saran-saran yang sangat berharga kepada penulis selama menyusun skripsi.

4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Amar, B,MS, Ibu Melti Roza Adry, SE, ME, Bapak Drs. Akhirmen, M.Si, dan Bapak Drs. Zul Azhar, M.Si selaku penguji yang telah dengan sabar memberikan kritik dan sarannya kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik dan bermanfaat untuk penelitian yang akan datang.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Ilmu Ekonomi yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan studi serta penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan ilmu tentang soft skill, organisasi, dan bantuan moral, material sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini.
7. Bapak dan Ibu Staf Tata Usaha Fakultas Ekonomi dan Bapak ibu Staf Perpustakaan Fakultas Ekonomi yang telah membantu kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Teristimewa penulis persembahkan kepada Orang Tua tercinta. Ayah Mursal dan Ibu Erniwita beserta kakak dan adik tersayang, Rendra Saputra, Yogi Agustia Chandra, Nindi Morita Sari, Ratih Andini Putri, Fikry Gunawan serta keluarga besar BM yang selalu mendoakan, memberikan motivasi dan pengorbanannya baik dari segi moril, materi kepada penulis dan saudari-

saudari penulis yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Sahabat dan orang-orang terdekat yang selalu mendukung. Puti Andini Benita, SE, Febbi Wulandari, SE, Ahmad Fauzan, SE, Hari Adria, SE, Afria Nanda, SE, Yeltari Bysolphy, SE, Alhady Bil Makruf, SE, Afdhal Mulya, SE, Yessika Emilia Rahmi, SE, Asma Ulyarahman, SE, Lita Agustia, SE, Suwandy, SE, Tri Rahmi Adita Happy, SE, terimakasih atas canda tawa, doa, bantuan dan motivasi yang kalian berikan kepada penulis. Gelar yang tertulis pada nama rekan semua merupakan doa dan harapan penulis agar rekan-rekan yang sedang berjuang juga dapat segera memperoleh gelar tersebut nantinya. Amin.
10. Rekan-rekan seperjuangan Jurusan Ilmu Ekonomi terutama angkatan 2012 yang telah memberikan dukungan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta semua pihak yang tidak mungkin disebutkan namanya satu persatu.
11. Warga Bundo, Leli Afriani (my roommate), Fitri Arini, Sulistya Taher, Era Afrilia, Rahmah Fitriani, Bella Guivera Diandes, Rina Martina, Faradila Zumra, Desi Guspita, Dara Hartia, Silvia Mimanda, Lusi, Patricia, Mega Desmina, Laila, Yusni, Dini Andriani, Lia, Bulan, Helmi dan lain-lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhirnya dengan kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan

kritik yang sifatnya membangun untuk kesempurnaan dimasa yang akan datang. Selanjutnya penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca umumnya dan penulis khususnya. Dengan tulus penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal bagi kita semua.

Padang, Februari 2018

Penulis,

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR LAMPIRAN	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN	12
A. Kajian Teori	12
1. Ketimpangan Pendapatan	12
2. Tenaga Kerja	18
3. Investasi	19
4. Infrastruktur Ekonomi	22
B. Penelitian Terdahulu	27
C. Kerangka Konseptual	29
D. Hipotesis	31
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33

B. Tempat dan Waktu Penelitian	33
C. Variabel Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Defenisi Operasional	35
G. Teknik Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Hasil Penelitian	46
1. Gambaran Umum Penelitian	46
2. Deskripsi Variabel Penelitian	48
3. Analisis Induktif	61
B. Pembahasan	68
1. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia	68
2. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia	70
3. Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia	71
4. Pengaruh Tenaga Kerja, Investasi dan Infrastruktur Ekonomi terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia	73
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	74
A. Simpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN	78

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Tabel Olah Data Sekunder Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016	78
2. Hasil Estimasi Common Effect Model (CEM)	82
3. Hasil Estimasi Fixed Effect Model (FEM)	83
4. Hasil Estimasi Random Effect Model (REM)	84
5. Hasil Uji Chow	85
6. Hasil Uji Hausman	86
7. Hasil Uji Asumsi Klasik	87
8. Hasil Estimasi Regresi Panel	88
9. Tabel t	89

DAFTAR TABEL

1. Gini Ratio Menurut Provinsi Di Indonesia Tahun 2012-2016	4
2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Pendidikan Terakhir SMA dan Perguruan Tinggi Tahun 2012-2016	6
3. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Menurut Lokasi di Indonesia Tahun 2012-2016	7
4. Infrastruktur Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2012–2016	9
5. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Provinsi	45
6. Gini Ratio Menurut Provinsi di Indonesia	47
7. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Keatas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi dan Pendidikan Terakhir SMA dan Perguruan Tinggi Tahun 2012-2016	50
8. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Menurut Lokasi di Indonesia Tahun 2012-2016	54
9. Belanja Modal Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016	57
10. Uji Chow	59
11. Uji Hausman	59
12. Uji Multikolonieritas	60
13. Uji Heterokedastisitas	61
14. Hasil Estimasi Regresi Panel	62

DAFTAR GAMBAR

1. Kurva Kuznets	14
2. Kerangka Konseptual	29

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Laporan Oxfam dan International NGO Forum on Indonesia Development (INFID) menguak kondisi ketimpangan ekonomi Indonesia yang memprihatinkan. Dalam laporannya, Oxfam Indonesia dan INFID mengungkapkan bahwa kesenjangan antara segelintir orang terkaya dan mayoritas penduduk Indonesia masih lebar. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi ketimpangan adalah pembangunan infrastruktur. Meski sebagian orang memandang bahwa pembangunan jalan tol, pelabuhan, atau kawasan industri hanya menguntungkan kelompok elit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menilai bahwa kelompok pertama yang merasakan manfaat dari pembangunan infrastruktur adalah kelompok ekonomi lemah. Ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan miskin di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia. Indikasi nyata tercermin dari pertumbuhan sektor jasa (terutama sektor jasa modern yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja dan kebanyakan tenaga kerja berpendidikan tinggi) yang sekitar dua kali lipat dari sektor penghasil barang.

Masalah utama dalam distribusi pendapatan adalah terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan. Hal ini bisa terjadi akibat perbedaan produktivitas yang dimiliki oleh setiap individu/kelompok yang mempunyai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan individu/kelompok lain, sehingga ketimpangan distribusi pendapatan tidak hanya terjadi di Indonesia saja tetapi juga terjadi di beberapa

Negara di dunia. Masyarakat yang berbeda mempunyai persepsi yang berbeda pula tentang apa itu adil (merata) dan norma-norma sosial budaya, sehingga kebijakan yang dilakukan untuk meningkatkan pemerataan tetap saja menimbulkan ketidakmerataan yang cukup besar dalam hal distribusi pendapatan.

Ketimpangan distribusi pendapatan pada daerah-daerah dapat disebabkan oleh pertumbuhan dan keterbatasan yang dimiliki masing-masing daerah yang berbeda-beda serta pembangunan yang cenderung terpusat pada daerah yang sudah maju. Hal ini menyebabkan pola ketimpangan distribusi pendapatan daerah dan merupakan salah satu faktor pendorong terjadinya ketimpangan distribusi pendapatan daerah semakin melebar.

Di Indonesia ketimpangan pendapatan masih terjadi. Ketimpangan pendapatan di Indonesia dapat dilihat dari indeks gini. Koefisien gini (*Gini Ratio*) adalah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.

Koefisien gini adalah ukuran ketimpangan agregat yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Semakin kecil nilai koefisien gini, mengindikasikan semakin meratanya distribusi pendapatan, sebaliknya semakin besar nilai koefisien gini mengindikasikan distribusi yang semakin timpang (senjang) antar kelompok penerima pendapatan. Adapun kriteria ketimpangan pendapatan berdasarkan koefisien gini menurut Kuncoro (2012:257) adalah nilai koefisien yang kurang dari 0,3 masuk dalam kategori ketimpangan yang

rendah, nilai antara 0,30 hingga 0,5 masuk dalam kategori moderat, dan lebih besar dari 0,5 dikatakan berada dalam ketimpangan yang tinggi.

Dalam beberapa tahun terakhir, gini rasio di Indonesia mengalami penurunan dari 0,41 menjadi 0,40. Ini menandakan ketimpangan orang kaya dan miskin di Indonesia semakin rendah. Seperti yang dapat dilihat pada tabel 1, bahwa Provinsi Maluku memiliki indeks gini yang menurun setiap tahunnya. Sedangkan investasi PMDN nya mengalami peningkatan. Hal ini tidak sesuai dengan teori yang menyatakan bahwa peningkatan investasi pada suatu daerah tanpa diikuti oleh peningkatan investasi di daerah lainnya, akan meningkatkan ketimpangan pendapatan. (Barro, dalam Yosi Eka Putri, 2013)

Menurut Kemenkeu, distribusi pengeluaran dari kelompok penduduk 40 persen terbawah menunjukkan indikasi membaik. Penyebab utama turunnya *Gini Ratio* antara lain karena kenaikan upah buruh pertanian dan upah buruh bangunan. Di sisi lain, peningkatan pendapatan kelompok penduduk bawah tidak lepas dari upaya pembangunan infrastruktur padat karya, beragam skema perlindungan dan bantuan social di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan lainnya yang dijalankan pemerintah. Alasan lain merosotnya gini rasio adalah karena meningkatnya jumlah dan persentase penduduk yang bekerja dengan status berusaha atau dibantu pekerja tidak dibayar yang merupakan kelompok terbesar pada kelas menengah, sebagai dampak dari kondusifnya pengembangan UMKM.

Berikut ini merupakan gambaran ketimpangan pendapatan di provinsi-provinsi di Indonesia.

Tabel 1. Gini Ratio Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016

No.	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1	Kep. Bangka Belitung	0,29	0,31	0,3	0,28	0,28	0,29
2	DI Yogyakarta	0,43	0,44	0,42	0,43	0,42	0,43
3	Sulawesi Selatan	0,41	0,43	0,42	0,42	0,43	0,42
4	Gorontalo	0,44	0,44	0,41	0,42	0,42	0,43
5	Maluku Utara	0,34	0,32	0,32	0,28	0,29	0,31
6	Papua Barat	0,43	0,43	0,44	0,44	0,37	0,42
7	Papua	0,44	0,44	0,41	0,42	0,39	0,42
	Indonesia	0,41	0,41	0,41	0,41	0,40	0,37

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

Pada Tabel 1 terlihat bahwa indeks gini selama periode tahun 2012 hingga 2016 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2012 gini rasio tertinggi berada di Provinsi Gorontalo dan Provinsi Papua, sedangkan pada tahun 2013 berada di 3 provinsi yaitu, D.I Yogyakarta, Gorontalo, dan Papua. Selama tahun 2014 dan 2015 berada di Provinsi Papua Barat yakni sebesar 0,44. Hal ini disebabkan karena adanya gap antara sektor modern dan tradisional. Seperti yang kita ketahui bahwa di Provinsi Papua Barat ada sektor pertambangan modern yaitu PT Freeport Indonesia dan lain-lain. Akan tetapi, dibawahnya masih banyak penduduknya yang sangat tradisional sekali. Seperti penduduk yang belum mendapatkan aliran listrik ke daerahnya, hingga penduduk yang masih bertahan tinggal di hutan. Sehingga wajar ada gap yang sangat besar. Selain itu, distribusi pengeluaran masyarakat yang bekerja di pemerintahan dengan yang tidak bekerja di pemerintahan juga sangat timpang.

Pada Tabel 1 juga terlihat bahwa pada tahun 2016, gini rasio tertinggi berada di Provinsi Sulawesi Selatan yakni 0,43. Hal ini karena perbedaan kecepatan pertumbuhan ekonomi antara di daerah pedesaan dan perkotaan di Provinsi Sulawesi

Selatan. Saat pertumbuhan naik tinggi, secara tiba-tiba akan lahir jurang pemisah karena ada yang tertinggal. Oleh karena itu, Pemprov Sulawesi Selatan berusaha menggenjot pembangunan infrastruktur, untuk memperlancar arus barang dan jasa sehingga merangsang munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru, misalnya dengan pembangunan jalan layang.

Tabel 1 juga memperlihatkan bahwa ketimpangan pendapatan terendah tahun 2012 hingga 2016 berada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yakni masing-masing sebesar 0,29, 0,31, 0,30, 0,28 dan 0,28. Hal ini dikarenakan pemerataan pembangunan yang sangat baik. Data ini konsisten dengan jumlah penduduk miskin di Bangka Belitung yang relatif rendah dibandingkan provinsi-provinsi lainnya yang hanya 71,07 ribu jiwa. Provinsi Bangka Belitung juga konsisten menunjukkan angka gini ratio yang paling rendah di Indonesia. Terlihat pada Tabel 1, Kep. Bangka Belitung mengalami penurunan gini rasio setiap tahunnya yakni dari tahun 2013 hingga 2016.

Faktor pertama yang menyebabkan ketimpangan pendapatan adalah tenaga kerja. Tenaga kerja merupakan penduduk yang berada dalam usia kerja. Menurut UU No. 13 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Dimana tenaga kerja diperoleh dari pendidikan dari seorang tenaga kerja. Apakah tenaga kerja tersebut

memiliki pendidikan yang tinggi atau tidak. Data diambil dari persentase penduduk 15 tahun ke atas yang berpendidikan SMA dan Perguruan Tinggi.

Tabel 2. Persentase Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Termasuk Angkatan Kerja Menurut Provinsi Dan Pendidikan Terakhir SMA Dan Perguruan Tinggi Tahun 2012-2016 (%)

No	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1	DKI Jakarta	65,42	66,81	66,73	64,30	68,46	66,34
2	Nusa Tenggara Timur	22,07	20,91	22,43	29,66	29,31	24,88
3	Sulawesi Barat	26,45	26,34	30,09	25,25	30,86	27,80
	Indonesia	35,36	36,66	37,89	39,73	41,87	38,3

Sumber : Badan Pusat Statistik (2017)

Tabel 2 menunjukkan bahwa persentase pendidikan angkatan kerja berusia 15 tahun ke atas menurut provinsi dan pendidikan terakhir SMA dan perguruan tinggi mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada tahun 2012 hingga 2016, provinsi tertinggi yang memiliki persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja dengan pendidikan terakhir SMA dan Perguruan Tinggi berada di Provinsi DKI Jakarta dengan persentase yang meningkat setiap tahunnya. Dengan persentase masing-masingnya yaitu, 65,42, 66,81, 66,73, 64,30 dan 68,46 persen. Sedangkan persentase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja dengan pendidikan terakhir SMA dan Perguruan Tinggi terendah selama tahun 2012 hingga 2014 berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 2015 berada di Provinsi Sulawesi Barat dan pada tahun 2016 kembali berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dilihat dari tabel 2, hal ini membuktikan bahwa total persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang termasuk angkatan kerja dengan pendidikan terakhir SMA

dan Perguruan Tinggi mengalami peningkatan setiap tahunnya, dimana dengan semakin tingginya pendidikan angkatan kerja, maka akan semakin berkualitaslah tenaga kerja tersebut, sehingga akan mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan yang akan mengurangi ketimpangan pendapatan yang akan diterima oleh masing-masing angkatan kerja.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan di Indonesia adalah investasi. Dimana data investasi diambil dari data penanaman modal dalam negeri. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Tabel 3. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN Menurut Lokasi di Indonesia Tahun 2012-2016 (miliar rupiah)

No.	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1	Jawa Timur	21.520,3	34.848,9	38.132,0	35.489,8	46.331,6	35.264,5
2	Maluku Utara	320,5	1.114,9	156,4	48,2	8,8	329,8
3	Papua Barat	45,8	304,0	100,1	63,4	10,6	104,8
	Indonesia	92.182,00	128.128,20	155.483,40	178.554,10	212.885,20	153.446,6

Sumber : Badan Koordinasi Penanaman Modal (2017)

Tabel 3 memperlihatkan bahwa tingkat investasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam negeri mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Tingkat investasi yang dilakukan di Indonesia adalah untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi angka pengangguran. Perluasan lapangan kerja akan cenderung meningkatkan permintaan tenaga kerja dalam negeri sehingga akan dapat mengurangi angka pengangguran yang ada.

Tabel 3 juga memperlihatkan bahwa tingkat investasi pada tahun 2012 hingga 2016 tertinggi berada di Provinsi Jawa Timur dengan jumlah masing-masing yaitu 21.520,3 miliar rupiah, 34.848,9 miliar rupiah, 38.132,0 miliar rupiah, 35.489,8 miliar rupiah dan 46.331,6 miliar rupiah. Salah satu faktor pendorong peningkatan penanaman modal di Provinsi Jawa Timur adalah karena adanya kawasan industri di Provinsi Jawa Timur yang masuk dalam kawasan industri KLIK (Kemudahan Investasi Langsung Konstruksi), sehingga komitmen investasi yang masuk dapat segera direalisasikan. Selain itu, faktor lainnya yang sangat mendukung iklim investasi di Surabaya adalah pembangunan infrastruktur jalan baru. Dan tidak kalah pentingnya yakni adanya kesiapan fasilitas pelayanan perizinan melalui system online, serta kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui jalur sertifikasi.

Tabel 3 juga menjelaskan bahwa investasi penanaman modal dalam negeri terendah pada tahun 2012 hingga 2014 terdapat di Provinsi Papua Barat. Kemudian, pada tahun 2015 dan 2016, investasi PMDN terendah berada di Provinsi Maluku Utara yakni sebesar 48,2 miliar rupiah dan 8,8 miliar rupiah. Hal ini karena menurunnya harga komoditas unggulan Maluku Utara yang menyebabkan para pelaku usaha cenderung menunda kegiatan investasi barunya. Selain itu, melambatnya perkembangan kegiatan investasi juga terindikasi dari total volume pengadaan semen di Maluku yang melambat dibandingkan sebelumnya.

Investasi yang dilakukan untuk meningkatkan lapangan kerja tidak hanya investasi yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta yang ada dalam negeri, tetapi

juga investasi yang dilakukan oleh investor asing yang sudah mendapatkan izin dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk melakukan penanaman modalnya di Indonesia.

Faktor terakhir yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan adalah infrastruktur ekonomi. Yang diukur dengan belanja modal, dimana belanja modal merupakan belanja pemerintah untuk infrastruktur seperti jalan, jembatan, gedung, dan lain-lain,

Tabel 4. Infrastruktur Ekonomi Menurut Provinsi di Indonesia Tahun 2012-2016 (jutaan rupiah)

No.	Provinsi	2012	2013	2014	2015	2016	Rata-Rata
1	Kep. Bangka Belitung	322.566	482.352	448.947	233.718	340.788	365.674
2	DKI Jakarta	10.944.406	15.732.627	29.036.373	10.244.017	16.182.961	16.428.077
3	Gorontalo	147.415	190.615	273.158	344.244	378.717	266.830
	Indonesia	31.815.256	43.124.495	61.020.574	44.167.179	57.741.545	47.573.810

Sumber : Kemenkeu (2017)

Tabel 4 memperlihatkan bahwa belanja modal untuk infrastruktur di Indonesia mengalami jumlah yang berfluktuasi setiap tahunnya. Dapat dilihat pada Tabel 4, selama kurun waktu tahun 2012 hingga 2016, tahun 2014 memiliki jumlah belanja modal tertinggi yaitu senilai 61.020.574 juta rupiah. Sedangkan untuk provinsi tertinggi yang memiliki belanja infrastruktur tertinggi tahun 2012 hingga 2016 berada di DKI Jakarta dengan jumlah masing-masing 10.944.406 juta rupiah, 15.732.627 juta rupiah, 29.036.373 juta rupiah, 10.244.017 juta rupiah, dan 16.182.961 juta rupiah.

Berdasarkan dari latar belakang diatas peneliti mencoba untuk mengetahui seberapa besar pengaruh tenaga kerja, investasi dan infrastruktur ekonomi terhadap

ketimpangan pendapatan sehingga peneliti memilih judul yaitu “**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, adapun perumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Seauhmana pengaruh tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
2. Seauhmana pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
3. Seauhmana pengaruh infrastruktur ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?
4. Seauhmana pengaruh tenaga kerja, investasi dan infrastruktur ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

1. Pengaruh tenaga kerja terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
2. Pengaruh investasi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
3. Pengaruh infrastruktur ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.
4. Pengaruh tenaga kerja, investasi dan infrastruktur ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah :

1. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi di Universitas Negeri Padang.
2. Sebagai pengembangan ilmu ekonomi makro tentang tenaga kerja, investasi, infrastruktur ekonomi dan ketimpangan pendapatan.
3. Bagi pengambil kebijakan yaitu, Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Barat.
4. Bagi peneliti lebih lanjut yang meneliti hal serupa.

BAB II

KAJIAN TEORI, KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

A. Kajian Teori

1. Ketimpangan Pendapatan

Menurut Todaro (2011:254), ketimpangan pendapatan adalah distribusi yang tidak proporsional dari pendapatan nasional total di antara berbagai rumah tangga dalam negara. Dengan kata lain, ketimpangan pendapatan adalah perbedaan jumlah pendapatan yang diterima masyarakat sehingga mengakibatkan perbedaan pendapatan yang lebih besar antar golongan dalam masyarakat tersebut. Akibatnya yang kaya akan semakin kaya dan yang miskin akan semakin miskin.

a. Pengertian Pendapatan

Pendapatan menurut ilmu ekonomi merupakan nilai maksimum yang dikonsumsi oleh seseorang dalam suatu periode dengan mengharapkan keadaan yang sama pada akhir periode seperti keadaan semula. Dengan kata lain, pendapatan adalah jumlah harta awal periode ditambah keseluruhan hasil yang diperoleh selama satu periode bukan hanya dikonsumsi.

Jhingan (2003:31) menulis bahwa pendapatan adalah penghasilan berupa uang selama periode tertentu. Maka dari itu, pendapatan dapat diartikan sebagai semua penghasilan atau menyebabkan bertambahnya kemampuan seseorang, baik yang digunakan untuk konsumsi maupun yang digunakan untuk tabungan. Dengan pendapatan yang diperoleh tersebut digunakan untuk keperluan hidup dan untuk mencapai kepuasan.

b. Ukuran Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Dari dimensi spasial, dengan indikator gini rasio sebagai ukuran ketimpangan distribusi pendapatan cukup bervariasi, baik antarprovinsi maupun daerah kota dan desa (Kuncoro, 2006:140). Ketimpangan pada kenyataannya tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. Adanya ketimpangan, akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Selain itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Akan tetapi ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Dampak negatif tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2004:56).

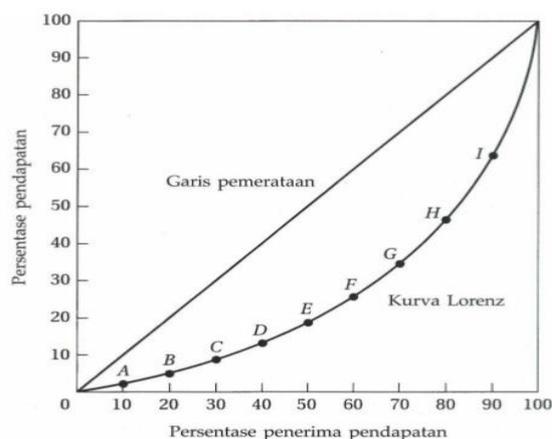
Alat ukur untuk menilai tingkat ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat adalah Gini Ratio (Kuncoro, 2006 : 139). Dari semua pengukur ketimpangan, indeks gini adalah yang paling sering dipakai sebagai indikator ketimpangan. Menurut Kuncoro, kesenjangan distribusi pendapatan dikategorikan:

- 1) Tinggi, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima kurang dari 12% bagian pendapatan.
- 2) Sedang, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima 12 hingga 17% bagian pendapatan.

- 3) Rendah, bila 40% penduduk berpenghasilan terendah menerima lebih dari 17% bagian pendapatan.

Simon Kuznets mengemukakan bahwa pada awal tahapan pertumbuhan perekonomian, distribusi pendapatan akan cenderung memburuk, hanya pada tahapan berikutnya, distribusi pendapatan akan membaik. Pengamatan ini akhirnya dikenal dengan sebutan kurva Kuznet “U-Terbalik”. Karena adanya pola perubahan longitudinal (deret waktu) dalam distribusi pendapatan kurangnya tampak seperti U terbalik, seiring kenaikan GNI per kapita dalam beberapa studi yang dilakukan Kuznets (Todaro, 2011: 277).

Metode lainnya yang lazim dipakai untuk menganalisis statistic pendapatan perorangan adalah dengan menggunakan kurva Lorenz. Seperti terlihat pada Gambar 1 berikut ini :



Gambar 1. Kurva Lorenz

Jumlah penerima pendapatan dinyatakan pada sumbu horizontal, tidak dalam arti absolute melainkan dalam persentase kumulatif. Sedangkan sumbu vertical

menyatakan bagian dari pendapatan total yang diterima oleh masing-masing persentase kelompok penduduk tersebut. Semakin jauh jarak kurva Lorenz dari garis diagonal (yang merupakan garis pemerataan sempurna), semakin timpang atau tidak merata distribusi pendapatannya.

Indeks Gini merupakan suatu ukuran pemerataan yang dihitung dengan membandingkan luas antara diagonal dan kurva Lorenz dibagi dengan luas segitiga dibawah diagonal. Rasio Gini bernilai antara 0 dan 1. Nilai 1 menunjukkan *complete inequality* atau *perfectly unequal*, di mana seluruh penduduk menempati satu lokasi di suatu negara dan tidak ada penduduk di lokasi lainnya. Nilai 0 menunjukkan *perfectly equal*, yaitu penduduk terdistribusikan sempurna di seluruh wilayah suatu negara. Jadi, semakin besar nilai rasio konsentrasi Gini, semakin besar ketidakmerataan antara antara distribusi penduduk dan jumlah lokasi (BPS).

Rumus Indeks Gini atau koefisien Gini atau koefisien Gini diformulasikan dalam rumus dibawah ini :

$$GR = 1 - \sum_{i=1}^n f_{pi} x (Fc_i + Fc_{i-1}) \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

GR : Koefisien Gini

F_{pi} : Frekuensi Penduduk dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke-i

F_{ci-1} : Frekuensi kumulatif dari total pengeluaran dalam kelas pengeluaran ke i-1

Indeks Gini memiliki beberapa kelebihan untuk dijadikan acuan mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan, kelebihan tersebut antara lain:

- 1) Tidak tergantung pada nilai rata-rata (*mean independence*). Ini berarti bahwa jika semua pendapatan bertambah dua kali lipat, ukuran ketimpangan tidak akan berubah.
- 2) Tidak tergantung pada jumlah penduduk (*population size independence*). Jika penduduk berubah, ukuran ketimpangan seharusnya tidak berubah, jika kondisi lain tetap (*ceteris paribus*).
- 3) Simentris, jika antar penduduk bertukar tempat tingkat pendapatannya, seharusnya tidak akan perubahan dalam ukuran ketimpangan.
- 4) Sensitivitas Transfer Pigou-Dalton. Dalam kriteria ini, transfer pendapatan dari si kaya ke si miskin akan menurunkan ketimpangan

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C. North dalam analisisnya tentang Teori Pertumbuhan Neo Klasik. Dalam teori tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lebih dikenal sebagai Hipotesa Neo-Klasik (Sjafrizal, 2012).

c. Jenis Distribusi Pendapatan

Distribusi pendapatan mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara dikalangan penduduknya. Salah satu indikator utama

untuk mengukur kemampuan ekonomi masyarakat adalah tingkat pendapatan masyarakat. Indikator yang dimaksud bersangkutan dengan pendapatan dan pengeluaran, dan yang lebih penting adalah mengetahui besarnya perbandingan penerimaan dan pengeluaran.

Menurut Todaro (2011:253) para ekonomi membedakan dua ukuran utama distribusi pendapatan untuk tujuan analitis dan kuantitatif. Kedua ukuran tersebut adalah ukuran distribusi pendapatan, yakni besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi “fungsional” atau kepemilikan faktor-faktor produksi.

1) Distribusi Pendapatan Perorangan

Distribusi pendapatan perorangan merupakan ukuran yang paling sering digunakan oleh para ekonom. Ukuran ini hanya menghitung jumlah pendapatan perorangan atau rumah tangga. Cara memperoleh pendapatan tidak dipertimbangkan.

2) Distribusi Pendapatan Fungsional

Ukuran kedua yang biasa digunakan para ekonomi untuk mengukur distribusi pendapatan adalah distribusi pendapatan fungsional atau distribusi pendapatan pangsa faktor, yang berupaya menjelaskan pangsa pendapatan nasional total yang diterima tiap faktor produksi. Ketimbang memandang orang-orang sebagai entitas terpisah, teori distribusi pendapata fungsional berusaha menemukan persentase yang diterima oleh tenaga kerja secara keseluruhan dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang didistribusikan dalam bentuk uang sewa, bunga, dan laba.

2. Tenaga Kerja

Adam Smith menjelaskan bahwa labor memegang peran penting dalam perekonomian. Peningkatan kualitas pekerja yang dicerminkan oleh tingkat pendidikan rata-rata yang semakin baik, memberi dampak positif terhadap produktivitas tenaga kerja. Untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas maka dibutuhkan pendidikan, karena pendidikan dianggap mampu menghasilkan tenaga kerja yang bermutu tinggi, mempunyai pola pikir dan cara bertindak yang modern. Sumber daya manusia seperti inilah yang diharapkan mampu menggerakkan roda pembangunan ke depan.

Tenaga kerja (man power) adalah penduduk usia kerja (berusia 15-64 tahun) atau jumlah seluruh penduduk dalam suatu negara yang memproduksi barang dan jasa jika ada permintaan terhadap tenaga kerja mereka, dan jika mereka mau berpartisipasi dalam aktivitas tersebut (Mulyadi, 2003:59). Tenaga kerja merupakan salah satu dari faktor produksi yang memiliki pengaruh negatif terhadap ketimpangan pendapatan. Karena dengan semakin tingginya jumlah tenaga kerja yang bekerja, akan mengakibatkan pendapatan yang diterima akan semakin bertambah. Hal ini menyebabkan distribusi pendapatan semakin mengalami pemerataan. Dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja yang bekerja akan meningkatkan jumlah pendapatan sehingga mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup dan mampu mengurangi pengangguran serta kemiskinan dan mampu untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonomi sehingga dapat mengurangi ketimpangan pendapatan pada suatu daerah ataupun negara.

Todaro (2011:445), menyatakan bahwa pendidikan dan kesehatan adalah tujuan pembangunan yang mendasar, pendidikan dan kesehatan masing-masing juga memiliki arti yang penting. Kesehatan sangat penting bagi kesejahteraan, dan pendidikan bersifat esensial bagi kehidupan yang memuaskan dan berharga, keduanya fundamental dalam kaitannya dengan gagasan lebih luas mengenai peningkatan kapabilitas manusia sebagai inti makna pembanguana yang sesungguhnya.

Pada saat yang sama, pendidikan memainkan peran penting untuk meningkatkan kemampuan suatu negara berkembang dalam menyerap teknologi modern dan mengembangkan kapasitas bagi terwujudnya pertumbuhan dan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, kesehatan adalah prasyarat bagi peningkatan produktivitas, dan pendidikan yang berhasil juga bergantung pada kesehatan yang memadai (Todaro, 2011:445).

3. Investasi

Menurut Sukirno (2004:121), investasi dapat diartikan sebagai pengeluaran penanaman modal atau perusahaan untuk membeli barang-barang modal dan perlengkapan-perengkapan produksi untuk menambah kemampuan memproduksi barang-barang dan jasa yang tersedia dalam perekonomian. Pertambahan jumlah barang modal ini memungkinkan perekonomian tersebut menghasilkan lebih banyak

barang dan jasa di masa yang akan datang. Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama yang telah haus dan perlu di depresiasikan.

Menurut Pradnyadewi (2017), investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran yang bertujuan menambah modal serta mendapatkan laba pada waktu tertentu. Terkonsentrasinya investasi di beberapa daerah akan menjadi salah satu faktor penyebab adanya ketimpangan pendapatan. Investasi menurut Mankiw (2006:476) adalah komponen GDP yang mengaitkan masa kini dan masa depan. Menurut Barro (dalam Yosi Eka Putri, 2013), peningkatan investasi pada suatu daerah tanpa diikuti oleh peningkatan investasi di daerah lainnya, akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

Investasi, yang lazim disebut dengan istilah penanaman modal atau pembentukan modal merupakan komponen kedua yang menentukan tingkat pengeluaran agregat. Apabila para pengusaha menggunakan uang tersebut untuk membeli barang-barang modal, maka pengeluaran tersebut dinamakan investasi. Dalam praktiknya, dalam usaha mencatat nilai penanaman modal yang dilakukan dalam suatu tahun tertentu, yang digolongkan sebagai investasi (atau pembentukan modal atau penanaman modal) meliputi pengeluaran yang berikut :

- a. Pembelian berbagai jenis barang modal, yaitu mesin-mesin dan peralatan produksi lainnya untuk mendirikan berbagai jenis industry dan perusahaan.

- b. Pengeluaran untuk mendirikan rumah tempat tinggal, bangunan kantor, bangunan pabrik dan bangunan-bangunan lainnya.
- c. Pertambahan nilai stok barang-barang yang belum terjual, bahan mentah dan barang yang masih dalam proses produksi pada akhir tahun penghitungan pendapatan nasional.

Berbeda dengan yang dilakukan oleh para konsumen (rumah tangga) yang membelanjakan bagian terbesar dari pendapatan mereka untuk membeli barang dan jasa yang mereka butuhkan, penanam-penanam modal melakukan investasi bukan untuk memenuhi kebutuhan mereka tetapi untuk mencari keuntungan. Dengan demikian banyaknya keuntungan yang akan diperoleh besar sekali perannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan oleh para pengusaha. Disamping ditentukan oleh harapan di masa depan untuk memperoleh untung, beberapa factor lain juga penting perannya dalam menentukan tingkat investasi yang akan dilakukan dalam perekonomian. Faktor-faktor utama yang menentukan tingkat investasi adalah :

- a. Tingkat keuntungan yang diramalkan akan diperoleh
- b. Suku bunga
- c. Ramalan mengenai keadaan ekonomi di masa depan
- d. Kemajuan teknologi
- e. Tingkat pendapatan nasional dan perubahan-perubahannya
- f. Keuntungan yang diperoleh perusahaan-perusahaan.

4. Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi suatu Negara dapat terwujud. Infrastruktur terdiri dari beberapa subsektor, beberapa diantaranya yang cukup dominan dalam pembangunan ekonomi adalah perumahan dan transportasi. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu negara dengan pertumbuhan ekonomi tinggi akan mampu melakukan pemerataan pembangunan kemudian melakukan pembangunan infrastruktur keseluruhan bagian wilayahnya. Perekonomian yang terintegrasi membutuhkan pembangunan infrastruktur.

Menurut kajian ilmiah yang dilakukan Deni Friawan (2008:56) menjelaskan setidaknya ada tiga alasan utama mengapa infrastruktur penting dalam sebuah integrasi ekonomi. Pertama, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemacu pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktifitas perdagangan dan investasi. Penurunan tarif akibat integrasi ekonomi tidak dapat menjamin bahwa akan meningkatkan aktivitas perdagangan dan investasi tanpa adanya dukungan dari infrastruktur yang memadai. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar Negara-negara di Asia dan juga mempercepat integrasi perekonomian Asia.

The World Bank (dalam Hidayatika,2007:19) membagi infrastruktur menjadi:

- a. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktifitas ekonomi, meliputi *public utilities* (listrik, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, irigasi, drainase) dan sector transportasi (jalan, kereta api, pelabuhan, lapangan terbang, angkutan transportasi)
- b. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
- c. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, kontrol administrasi dan koordinasi.

Permasalahan infrastruktur di Indonesia diakibatkan oleh masalah sektoral dan lintas sektoral. Maka dibutuhkan kebijakan-kebijakan yang dapat menjembatani sector-sector terkait. Seperti dari sisi pembiayaan pemerintah diharapkan mampu membuat mekanisme penentuan resiko investasi dan mengembangkan metodologi yang dapat secara mudah diterapkan. Di saat bersamaan, mengingat mobilisasi investasi dari sektor swasta membutuhkan waktu, pemerintah diharapkan tetap memberikan perhatian pada peningkatan investasi publik sehingga kebutuhan infrastruktur dapat terpenuhi, salah satunya melalui peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur. Namun jika pengeluaran pemerintah saja tidak cukup diperluka peran pihak swasta. Peran pemerintah untuk meningkatkan perhatian swasta adalah dengan bantuan pembebasan lahan, subsidi operasional dan modal, dan jaminan resiko usaha. Peningkatan pengeluaran pemerintah atas infrastruktur juga harus diikuti dengan efektivitas dan efisiensi dari pengeluaran tersebut. Hal tersebut

dilakukan untuk meningkatkan kualitas infrastruktur yang dibangun dan agar terciptanya transparansi dalam proses pengadaan barang dan pembangunan.

5. Pengaruh Tenaga Kerja Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Nurul Tri Wahyuni (2016) menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh untuk mengurangi ketimpangan pendapatan. Pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan. Ketimpangan pendapatan terjadi karena adanya *over-education*, interaksi antara kemampuan dan pendidikan, serta perbedaan kualitas pendidikan. Sekolah atau jurusan (bidang studi) antar wilayah pendidikan bisa mengurangi ketimpangan pendapatan. Oleh karena itu, pemerintah bisa meningkatkan investasi di bidang pendidikan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan.

Sukirno (2006:443), menyatakan bahwa tingkat pendidikan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Dimana individu yang mendapatkan pendidikan cenderung akan memperoleh pendapatan yang lebih tinggi. Semakin tinggi pendidikan, maka semakin tinggi pula pendapatan yang akan diperoleh. Jadi, semakin tinggi tingkat pendidikan tenaga kerja maka akan semakin rendah ketimpangan pendapatannya.

Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan tenaga kerja memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Dimana ketika pendidikan tenaga kerja tersebut tinggi, maka akan mengurangi ketimpangan pendapatan yang ada. Begitupula sebaliknya, ketika pendidikan tenaga kerja tersebut rendah, maka akan meningkatkan ketimpangan pendapatan di Indonesia.

6. Pengaruh Investasi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Investasi atau penanaman modal merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menambah modal serta memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang. Investasi yang terkonsentrasi hanya di beberapa daerah akan menjadi salah satu penyebab adanya ketimpangan pendapatan. Hal ini dikarenakan hanya daerah-daerah yang dinilai mendapatkan profit yang menjanjikan yang akan dilirik oleh para investor baik investor dalam negeri maupun luar negeri.

Menurut Sultan dan Jamzani (2010) realita di negara berkembang dalam pembangunan terdapat kemajuan yang tidak merata antar daerah atau dengan kata lain terdapat tingkatan ketimpangan antar daerah. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, secara geografis wilayah terdiri atas kepulauan yang menyebabkan terkonsentrasinya kegiatan ekonomi ke wilayah pusat pemerintah dan pertumbuhan.

Berdasarkan teori Harrod-Domar yang menerangkan adanya korelasi positif antara tingkat investasi dan laju pertumbuhan ekonomi, dapat dikatakan bahwa kurangnya investasi di suatu wilayah membuat pertumbuhan ekonomi dan tingkat pendapatan masyarakat per kapita di wilayah tersebut rendah karena tidak ada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif. Dan terpusatnya investasi di suatu wilayah, maka ketimpangan distribusi investasi ini dianggap sebagai salah satu faktor utama yang mengakibatkan terjadinya ketimpangan pembangunan.

Harrod-Domar menjelaskan bahwa pembentukan modal/investasi merupakan faktor penting yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Dalam teorinya, Harrod-

Domar berpendapat investasi berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dalam perspektif jangka waktu yang lebih panjang. Dapat kita simpulkan, investasi akan berpengaruh secara langsung ataupun tidak langsung pada pertumbuhan ekonomi, kemudian dengan adanya peningkatan investasi maka pertumbuhan ekonomi juga meningkat, seiring dengan peningkatan pertumbuhan tersebut maka akan berpengaruh pada ketimpangan pendapatan. Peningkatan atau penurunan investasi yang saling berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor pemicu ketimpangan pendapatan antar daerah.

Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi yang terkonsentrasi di wilayah pusat pemerintahan dan pertumbuhan, akan lebih dilirik oleh para investor karena dianggap lebih produktif dibandingkan wilayah lainnya. Hal inilah yang kemudian dapat menyebabkan adanya ketimpangan pendapatan antar wilayah.

7. Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Terhadap Ketimpangan Pendapatan

Putri (2014) yang mengatakan salah satu cara untuk mendukung peningkatan PDRB yaitu dengan lebih meningkatkan belanja daerah dalam bidang infrastruktur. Biaya infrastruktur merupakan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pengadaan infrastruktur suatu daerah. Faktor pendorong produktivitas suatu daerah salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur. Tersedianya fasilitas pelayanan publik membuat masyarakat akan lebih aktif dan bergairah dalam bekerja serta dengan adanya fasilitas yang baik akan meningkatkan jumlah investasi di masing-masing daerah yang akan

mampu mempercepat pembangunan ekonomi sehingga akhirnya akan mengurangi tingkat ketimpangan yang ada.

Jadi dapat disimpulkan bahwa keberadaan infrastruktur yang memadai akan menunjang aktivitas perekonomian di suatu daerah, sehingga mendorong arus investasi masuk ke daerah tersebut, yang kemudian akan memperlancar perekonomian. Hal inilah yang kemudian dapat menyebabkan ketimpangan pendapatan rendah.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini diperlukan untuk mendukung penelitian yang penulis lakukan agar dapat diketahui pendapat atau hasil terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis teliti. Dibawah ini dikemukakan hasil penelitian yang telah dilakukan di lapangan yaitu ;

Yosi Eka Putri (2013), melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan di Indonesia”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi, produktivitas tenaga kerja, investasi, dan IPM berpengaruh signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

Diah Pradnyadewi (2017), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh langsung dan signifikan IPM

terhadap pertumbuhan ekonomi. Biaya infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. IPM dan investasi tidak memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan. Pertumbuhan ekonomi sebagai variabel intervening yang mempengaruhi IPM dan biaya infrastruktur secara tidak langsung terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Ni Putu Valentiana Shanty Putri (2014), melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan di Provinsi Bali”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara simultan PAD, DAU dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Secara parsial, PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sedangkan belanja modal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan.

Nita Tri Hartini (2017) melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh PDRB Perkapita, Investasi dan IPM Terhadap Ketimpangan Pendapatan Antar Daerah di Provinsi DIY Tahun 2011-2015”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel PDRB per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan, sementara investasi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Sedangkan

secara simultan, seluruh variabel penelitian berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang penulis bahas terletak pada variabel yang digunakan, dimana penulis menggunakan variabel tenaga kerja, investasi dan infrastruktur ekonomi. Serta tahun yang diteliti juga berbeda yakni tahun 2012 hingga 2016. Sedangkan penelitian terdahulu memiliki beberapa variabel yang berbeda dan tahun yang berbeda pula.

C. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini dimaksudkan sebagai konsep untuk menjelaskan, mengungkapkan dan menentukan persepsi-persepsi antara variable-variabel yang akan diteliti berdasarkan batasan dan rumusan masalah dengan berpijak pada kajian teori di atas. Ketertarikan variable yang diteliti adanya hubungan antara tenaga kerja (X_1), investasi (X_2), dan infrastruktur ekonomi (X_3), serta ketimpangan pendapatan (Y) sebagai variabel terikat.

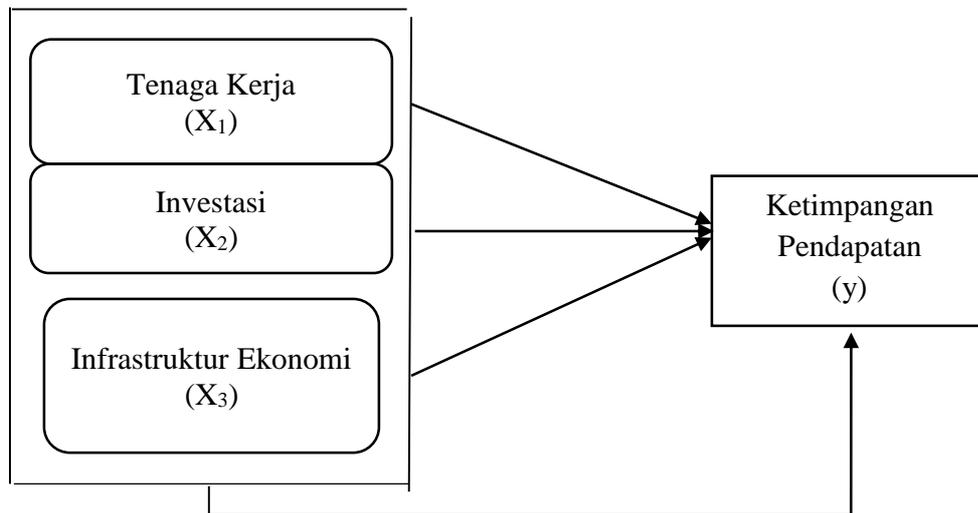
Tenaga kerja (X_1), merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi distribusi pendapatan di Indonesia. Tenaga kerja diukur dari pendidikan tenaga kerja tersebut. Dimana semakin tinggi pendidikan tenaga kerja di suatu daerah, maka akan semakin rendah ketimpangan pendapatannya. Begitupun sebaliknya, jika pendidikan tenaga kerja rendah, maka akan semakin tinggi ketimpangan pendapatannya. Sehingga menyebabkan adanya pengaruh negatif antara ketimpangan pendapatan dan pendidikan tenaga kerja.

Investasi (X2) merupakan penanaman modal yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan pada suatu periode tertentu. Investasi dilihat dari penanaman modal dalam negeri. Dimana investasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Apabila investasi semakin tinggi, maka semakin rendah ketimpangan pendapatannya, begitupun sebaliknya. Hal ini menyebabkan pengaruh negatif antara ketimpangan pendapatan dan investasi.

Infrastruktur ekonomi (X3) merupakan salah satu faktor pendorong produktivitas daerah untuk menciptakan efisiensi serta efektivitas di berbagai sector. Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional maupun regional. Dimana semakin tinggi jumlah infrastruktur ekonomi, semakin rendah ketimpangan pendapatan, begitupun sebaliknya. Sehingga infrastruktur ekonomi memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan.

Secara bersama-sama, tenaga kerja, investasi dan infrastruktur ekonomi memiliki pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan.

Berdasarkan kajian teori diatas dapat dituliskan kerangka konseptual yang menggambarkan dan menjelaskan pengaruh antara variabel-variabel dalam penelitian ini seperti gambar berikut :



Gambar 2. Kerangka Konseptual

Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Ketimpangan Pendapatan Antar Provinsi di Indonesia

D. Hipotesis

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dirumuskan diatas, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

1. Tenaga kerja berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq 0$$

2. Investasi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

$$H_0 : \beta_2 = 0$$

$$H_a : \beta_2 \neq 0$$

3. Infrastruktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia

$$H_0 : \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_3 \neq 0$$

4. Tenaga kerja, investasi dan infrastruktur ekonomi berpengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia.

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0$$

$$H_a : \beta_1 \neq \beta_2 \neq \beta_3 \neq 0$$

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. SIMPULAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh tenaga kerja, investasi dan infrastruktur ekonomi terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia selama periode tahun 2012-2016. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Variabel tenaga kerja memiliki pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa nilai dari tenaga kerja yang semakin tinggi akan menurunkan ketimpangan pendapatan, karena tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pemerataan ketimpangan pendapatan.
2. Variabel investasi memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Hal tersebut menjelaskan bahwa investasi yang semakin tinggi akan meningkatkan ketimpangan pendapatan, karena investasi merupakan faktor penting dalam pemerataan ketimpangan pendapatan. Namun dampak yang diberikan investasi tidak signifikan.
3. Variabel infrastruktur ekonomi memiliki pengaruh yang tidak signifikan dan positif terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Namun pengaruh yang diberikan infrastruktur ekonomi tidak signifikan.
4. Secara bersama-sama tenaga kerja, investasi dan infrastruktur ekonomi berpengaruh secara signifikan terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia. Artinya variabel tenaga kerja, investasi dan

infrastruktur ekonomi secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan antar provinsi di Indonesia.

B. SARAN

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diajukan saran sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan tenaga kerja serta keterampilan guru dalam mendidik, karena dengan kualitas pendidikan serta tersedianya sarana dan prasarana pendidikan diharapkan mampu menekan laju pertumbuhan ketimpangan pendapatan.
2. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan tingkat investasi yang terjadi di Indonesia.
3. Disarankan kepada pemerintah untuk lebih memperhatikan ketersediaan infrastruktur untuk menunjang perekonomian di Indonesia.
4. Dalam penelitian selanjutnya perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan melibatkan banyak variabel-variabel yang berpengaruh terhadap ketimpangan pendapatan dan diluar variabel yang telah penulis teliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Gujarati, Damodar dan Sumano Zain. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 2007. *Dasar-Dasar Ekonometrika* Jakarta: Erlangga.
- Hidayatika, M.D. 2007. *Peranan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Pulau Jawa*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- Jhingan, ML. 2003. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kuncoro, Mudrajad. 2006. *Ekonomi Pembangunan*. UPP STIM YKPN : Yogyakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2012. *Perencanaan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Pradnyadewi, Diah. 2017. *Pengaruh IPM, Biaya Infrastruktur, Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Bali*. Jurnal Ilmiah FEB Udayana : Bali
- Putri, Yosi Eka, Syamsul Amar dan Hasdi Aimon. 2013 *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pendapatan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah : Padang.
- Putri, Valentiana, dan Suardhika Nata. 2014. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Terhadap Ketimpangan Distribusi Pendapatan. *E-Jurnal EP Unud*, 4(1): 41-49.
- Sari, Pramita Sari. 2016. *Pengaruh Tenaga Kerja, Tingkat Pendidikan, Investasi Dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Distribusi Pendapatan Di Indonesia*. Jurnal Ilmiah FE UNP : Padang.
- Sjafrizal. 2012. *Ekonomi Wilayah dan Perkotaan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Suharyadi dan Purwanto. 2013. *Statistika Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi : Teori Pengantar*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2006. *Pengantar Teori Makro Ekonomi*, edisi kelima. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Sultan dan Jamzani. 2010. *Analisis Ketimpangan Pendapatan Regional di DIY-Jawa Tengah serta faktor-faktor yang Mempengaruhi periode 2000-2004*. Buletin Ekonomi Vol.8 Universitas Pembangunan Yogyakarta.